



Bab 6

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Penyelenggaraan Pemerintahan pada prinsipnya adalah mekanisme proses pengaturan kehidupan bernegara dan bermasyarakat sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan didalamnya telah dijelaskan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai daerah otonom; demikian pula Kota Kendari dalam menjalankan kewenangan yang diberikan tetap berpedoman pada Undang-Undang dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku, untuk itulah melalui LKPJ ini di sampaikan beberapa hal menyangkut penyelenggaraan pemerintahan umum.

A. Kerjasama Antar Daerah

1. Kebijakan dan Kegiatan

Kerjasama antar daerah adalah suatu kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kota dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, optimalisasi potensi daerah yang dimiliki serta peningkatan daya saing wilayah, khususnya pada bidang kegiatan tertentu, pelaksanaan kerjasama tetap diarahkan pada pencapaian visi dan misi serta merupakan salah satu bagian untuk menjawab permasalahan pada 8(delapan) isu pokok.

Dalam Kerjasama antar kota atau antar daerah juga telah ditegaskan dalam pasal 195 Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 diharapkan dapat memberikan kontribusi yang saling menguntungkan sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah yang bersangkutan dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah dan bahwa setiap daerah bersifat otonom dan dapat melakukan kerjasama dengan daerah/kabupaten dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam proses kerjasama dibidang pembangunan antar wilayah sehingga terjadi saling menguntungkan bagi kepentingan masyarakat diwilayah masing masing.

Kerjasama antar daerah sebagai kebijakan daerah yang dilakukan Pemerintah Kota dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan mengoptimalkan potensi dan sumber daya baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang dimiliki serta dalam rangka peningkatan daya saing wilayah. Kegiatan pelaksanaan kerjasama tetap diarahkan pada pencapaian visi dan misi masing masing wilayah serta dalam rangka mengembangkan jaringan kerjasama antar wilayah dalam upaya percepatan pembangunan khususnya untuk daerah-daerah perbatasan.



Ada beberapa kerjasama yang dilakukan dengan pemerintah pusat, yang kegiatannya meliputi:

- a. Refleksi kemiskinan melalui program
- b. Program Bantuan Stimulan pembangunan Perumahan Swadaya (BSP2S) bagi masyarakat berpenghasilan rendah
- c. Neighborhood Upgrading Shelter Sector Project (NUSSP) kerjasama Departemen PU
- d. Program Sanitasi Masyarakat (Sanimas) Kerjasama Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen PU dan Pemerintah Kota Kendari

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

- a. Refleksi kemiskinan melalui program P2KP kerjasama Pemerintah Kota Kendari dengan Dirjen Cipta Karya, Departemen Kimpraswil Pusat dengan anggaran masing-masing Rp. 800.000.000,- pada 6 kecamatan dan 10 kelurahan di Kota Kendari.
- b. Program Bantuan Stimulan pembangunan Perumahan Swadaya (BSP2S) bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang program dan pendanaannya bersumber dari Kementrian Perumahan Rakyat Republik Indonesia, deputi Penyediaan Perumahan Swadaya dengan anggaran sebesar Rp. 350.000.000,- yang dialokasikan pada 2 kecamatan yaitu: Kecamatan Mandonga dan Puwatu sebanyak 70 (tujuh puluh) unit rumah.
- c. Neighborhood Upgrading Shelter Sector Project (NUSSP) kerjasama Departemen PU dengan Pemerintah Kota Kendari dalam rangka penanganan Kualitas Lingkungan Pemukiman yang pembiayaannya berasal dari Pemerintah Pusat.
- d. Program Sanitasi Masyarakat (Sanimas) Kerjasama Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen PU dan Pemerintah Kota Kendari dalam rangka penyediaan sanitasi masyarakat miskin dengan anggaran sebesar Rp.700.000.000,- yang dialokasikan pada Kel Benu-Benua dan Petoaha

3. Permasalahan dan Solusi

a. P2KP

1. Kontrak konsultan sudah berakhir sejak tahun 2008 sementara BLM II dan BLM III belum di cairkan, di satu sisi masyarakat perlu pendampingan jasa konsultan.
2. Masa 1 tahun refleksi kemiskinan dirasakan belum cukup untuk memperkuat kelembagaan tingkat BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat).



3. Dari 10 Kelurahan yang memperoleh refleksi, masih ada sebagian besar pada kegiatan fisik belum tepat lokasi dan tepat sasaran.

b. Solusi.

1. Berdasarkan amanah dari surat Dirjen Cipta Karya No. km-0905-CB/ 425, perihal pendampingan refleksi P2KP di Kota kendari. Pemerintah Kota kendari harusnya mengadakan mengevaluasi kinerja konsultan sebelum memutuskan memperpanjang atau tidak kerja konsultan sampai dengan tahun 2008, dalam rangka pendampingan program refreleksi.
2. Bila Pemerintah ingin melanjutkan pendampingan kepada masyarakat maka perlu ada penguatan-penguatan kelembagaan BKM. Dalam bentuk pelatihan atau kociing dan pentingnya kerjasama antara BKM dan pihak Pemerintah, dalam hal PJOK tingkat kelurahan dan kecamatan.
3. Perlunya mengoktimalkan peran TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) Reflikasi dalam melakukan Monev terhadap segala aktifitas BKM, faskel maupun konsultan.

b. BSP2S

1. Masyarakat masih memerlukan pembangunan baik peningkatan kualitas (PK) maupun pembangunan Baru (PB) pada seluruh wilayah kecamatan dalam kota Kendari berdasarkan data yang telah disampaikan pada Kementerian Perumahan Rakyat Republik

2. Solusi

1. Diupayakan penambahan pembangunan rumah baru (PB) dan peningkatan kualitas (PK) baik melalui program yang BSP2S dengan tetap melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak Kementerian Perumahan Rakyat sehingga masyarakat miskin di Kota Kendari bisa menikmati rumah layak huni.

B. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga

Selain kerjasama antar daerah Pemerintah Kota juga melakukan kerjasama dengan pihak ketiga khususnya pada sektor-sektor yang memiliki nilai ekonomis dan bersifat *cost recovery*, hal ini juga di dasari oleh Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 176 yang berbunyi “.... Pemerintah daerah dalam meningkatkan perekonomian daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam Perda dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.....” kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur daerah (khususnya infrastruktur mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan), maka dibutuhkan pemodal atau investor untuk melakukan investasi.



1. Kebijakan dan Kegiatan

Sesuai visi-misi Kota Kendari khususnya pada misi ke-4 misi ekonomi, maka kebijakannya adalah mendorong pertumbuhan perekonomian kota yang berbasis pada ekonomi kerakyatan serta menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaksanaan investasi sesuai potensi daerah. Untuk mengembangkan potensi daerah dibutuhkan pembiayaan yang cukup besar, sehingga diperlukan adanya investor yang mau menanamkan modalnya di Kota Kendari.

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Dalam tahun 2007 realisasi pelaksanaan kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dimana pihak pengusaha diberikan hak pelaksanaan kegiatan tersebut hingga selesai mencapai 100 % setelah itu diserahkan kepada Pemerintah Kota dan Pemerintah Kota membayar kepada pihak ketiga sejumlah dana sesuai kesepakatan dalam perjanjian kontrak.

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

Terkadang timbul konflik-konflik ketika terjadi kenaikan harga di pasaran yang secara tiba-tiba diakibatkan oleh kenaikan harga BBM, selain itu terkadang hilangnya barang dipasaran.

Solusi

Agar perlu mencari pihak ketiga yang memiliki komitmen yang lebih baik dan lebih profesional.

C. Koordinasi dengan Instansi Vertikal Di Daerah

Penyelenggaraan koordinasi dengan instansi vertikal telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah serta Undang-Undang Nomo 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Beberapa instansi vertikal yang ada dalam lingkup pemerintah kota yaitu: Kandep Depag, Badan pertanahan Nasional (BPN) Badan Pusat Statistik (BPS) dan lembaga lainnya.

1. Kebijakan dan Kegiatan

Kebijakan yang ditempuh Pemerintah Kota dalam koordinasi dengan Instansi vertikal adalah koordinasi program dan kegiatan bidang pembangunan, administrasi pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan serta partai politik, dimaksudkan agar program dan kegiatan yang dilakukan dapat bersinergi dengan kebijakan-kebijakan Pemerintah Kota tidak tumpang tindih atau saling bertentangan antara program instansi vertikal dengan program Pemerintah Daerah.



2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Program dan kegiatan instansi vertikal selama ini masih terpusat dan dikelola oleh departemen terkait dari masing-masing instansi vertikal. Namun ada beberapa instansi vertikal yang dapat dilaporkan realisasi kegiatannya, yang berupa:

- a. Dokumen PDRB (*Produk Domestik Regional Bruto*) Tahun 2007
- b. Kota Kendari dalam Angka Tahun 2007
- c. Laporan Keuangan Makro Kota Kendari tahun 2007
- d. Penanganan Penghijauan kawasan lindung Tahura Murhum dan Papalia (Nanga-nanga) melalui program GERHAN
- e. Program Pencegahan pendangkalan Teluk Kendari dan penataan teluk Kendari
- f. Program Peningkatan sarana dan prasarana Pemadam kebakaran
- g. Program Ketahanan pangan melalui Departemen Pertanian
- h. Pensertifikatan tanah milik melalui Prona BPN
- i. Peningkatan pelayanan kehidupan beragama melalui Departemen Agama
- j. Bimbingan teknis ketenaga kerjaan
- k. Penanggulangan bencana alam
- l. Pembinaan peningkatan kesejahteraan keluarga

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

- a. Pada saat akan dilakukan pelaksanaan kegiatan terkadang tidak disampaikan sebelumnya kepada Pemerintah Kota.
- b. Masih adanya Satker (satuan kerja) melaksanakan kegiatan berorientasi pada sasaran proyek belum pada sasaran manfaat.
- c. Umumnya para Satker tidak memberikan tembusan laporan kepada Pemerintah Kota atas pelaksanaan kegiatan.

Solusi :

- a. Perlunya ada koordinasi yang kontinyu atau secara berkala
- b. Perlu adanya kesamaan persepsi tentang nilai manfaat suatu kegiatan terhadap masyarakat
- c. Perlu disampaikan kepada para Satker agar setiap laporan yang dibuat tembusannya disampaikan kepada Pemerintah Kota.

D. Pembinaan Batas Wilayah

Sebagaimana di maklumi bahwa hal yang sangat krusial dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia adalah permasalahan batas wilayah, demikian pula di Kota Kendari.

1. Kebijakan dan Kegiatan

Dalam masalah perbatasan yang terjadi adalah antara Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan dan Kota Kendari kebijakan Pemerintah Kota yang ditempuh adalah terus mendorong Pemerintah Provinsi Sultra dapat memfasilitasi dan sekaligus menyelesaikan, masalah perbatasan.



2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan.

Yakni yang berada di sebelah barat Kota Kendari tepatnya di poros punggaluku dekat asrama brimob dan kegiatan yang telah dilakukan dengan difasilitasi oleh Pemda Provinsi mengundang pihak Kabupaten Konseil melakukan beberapa rapat dan diputuskan bahwa perbatasan Kota Kendari dipindahkan hingga sampai Ring Road samping brimob, dimana tadinya asrama Brimob ini masuk wilayah Kabupaten Konseil dan sekarang telah masuk wilayah Kota Kendari.

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

Terjadi tarik menarik batas wilayah dengan Pemerintah Kabupaten Konseil dan sulitnya untuk memberi pemahaman, karena selama ini masyarakat yang berada disekitar perbatasan tersebut urusan administrasi dan pelayanan pemerintahan selalu kepada Pemerintah Kota mengingat jarak untuk berurusan ke Pemerintah Kabupaten sangat jauh dan memerlukan biaya yang cukup besar.

Solusi.

Telah dilakukan rapat-rapat bersama Pemerintah Provinsi dan hasilnya telah diputuskan bahwa batas wilayahnya dipisahkan melalui jalan Ringroad

E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana.

Seperti diketahui bahwa pada akhir-akhir ini di hampir seluruh wilayah Negara kita telah dihantam berbagai bencana mulai tsunami, banjir, tanah longsor, hama penyakit yang mematikan, gempa bumi, kebakaran, badai hingga angin puting beliung, demikian pula di Kota Kendari walau bencananya masih berskala kecil (banjir) namun perlu diwaspadai bencana alam lainnya.

1. Bencana Yang Terjadi

Letak Kota Kendari pada dasarnya bukan berada diwilayah garis patahan bumi dan juga bukan daerah yang memiliki gunung berapi sehingga bencana yang pernah terjadi adalah banjir dan getaran Gempa Bumi yang dirasakan, sedangkan untuk wabah penyakit adalah Demam Berdarah (DBD).

2. Status Bencana.

Adapun status bencana yang terjadi sepanjang tahun 2007 masih merupakan status bencana Lokal, yaitu banjir dengan meluapnya sungai Wanggu dan beberapa sungai-sungai kecil.



3. Sumber dan Jumlah Anggaran

Pemerintah Kota setiap tahunnya mengalokasikan dana penanggulangan bencana dan KLB (kejadian luar biasa) pada pos cadangan dan dana ini dapat digunakan sewaktu-waktu ketika terjadi bencana.

Program dan Kebijakan SKPD yang menangani Pencegahan dan Penanggulangan Bencana untuk Tahun Anggaran 2007

No.	SKPD	Kebijakan dan Program
1.	Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas	<ul style="list-style-type: none">- Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan.- Program Pemeliharaan dan Pencegahan Tindak Kriminal
2.	Dinas Kebersihan	<ul style="list-style-type: none">- Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan- Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan- Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)- Program RTH- Program Pengendalian Banjir- Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial
3.	Kantor Polisi Pamong Praja	<ul style="list-style-type: none">- Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan- Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
4.	Kantor Pemadam Kebakaran	<ul style="list-style-type: none">- Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
5.	Bagian Hukum	<ul style="list-style-type: none">- Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
6.	Dinas PU	<ul style="list-style-type: none">- Program Pengembangan Jalan dan Jembatan- Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong- Program Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya- Program Penataan Lingkungan Permukiman- Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku--



7.	Dinas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none">- Program Obat dan Perbekalan Kesehatan- Program Upaya Kesehatan Masyarakat- Program Pengembangan Obat Asli Indonesia- Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat- Program Pengembangan Lingkungan Sehat- Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan- Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya- Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit- Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
8.	Dinas Nakertransos	<ul style="list-style-type: none">- Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja- Program Transmigrasi Lokal- Program Peningkatan Kesempatan Kerja- Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan- Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan- Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PKMS) Lainnya- Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial- Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial- Program Pembinaan Panti Sosial



Sumber dan Jumlah Anggaran Penanganan Bencana Alam dan Gangguan Ketertiban Kota Kendari Tahun 2007

No	SKPD	Jumlah Anggaran Tahun 2007 (Rp)	Sumber Anggaran
1	2	3	4
1.	Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas	2.145.819.061	APBD Kota Kendari
2.	Dinas Kebersihan	4.429.731.956	APBD Kota Kendari
3.	Kantor Polisi Pamong Praja	1.820.292.778	APBD Kota Kendari
4.	Kantor Pemadam Kebakaran	2.121.151.995	APBD Kota Kendari
5.	Bagian Hukum	255.400.000	APBD Kota Kendari
6.	Dinas PU	28.756.035.723	APBD dan APBN
7.	Dinas Kesehatan - APBD Kota - DAK Kesehatan - Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) - Perbaikan Gizi - Intervensi KIA	3.999.482.050 6.895.000.000 1.397.211.000 517.675.500 15.000.000	
8.	Dinas Nakertransos	3.241.031.451	APBD Kota Kendari

Sumber: Bappeda Kota Kendari, 2007

4. Antisipasi Daerah dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana

- Menentukan titik evakuasi
- Melakukan sosialisasi dengan warga sekitar lokasi rawan bencana untuk selalu waspada dan tidak panik ketika terjadi bencana.
- Peningkatan kemampuan anggota SATKORLAK dengan memberikan pelatihan-pelatihan khusus kepada mereka termasuk peningkatan kepedulian kepada seluruh masyarakat untuk mau menolong sesama ketika terjadi bencana.
- Mempersiapkan sebagian peralatan penyelamatan dan evakuasi bencana.
- Menyusun mekanisme pola penyelamatan dan evakuasi.
- Membuat peta rawan bencana sekaligus menyampaikan kepada warga masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana.



5. Potensi Bencana yang di Perkirakan Terjadi.

- a. Banjir
- b. Gempa Bumi
- c. Tanah longsor
- d. Wabah Penyakit

F. Pengelolaan Kawasan Khusus

Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah di jelaskan yang dimaksud Kawasan khusus adalah bagian wilayah dalam Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi Pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan Nasional.

Dari pengertian tersebut, maka Kota Kendari tidak memiliki kawasan yang dimaksud baik yang Menjadi Kewenangan Daerah, sumber anggaran, maupun permasalahan dan solusi

G. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Selain bencana alam di negara kita juga ini sering tmbul gangguan keamanan yang menimbulkan konflik horisontal, seperti: SARA, anarkisme, separatis, terorisme, walau di Kota Kendari hal-hal semacam itu tidak terjadi namun perlu terus di waspadai karena hal-hal seperti ini dapat saja terjadi setiap saat.

1. Gangguan yang terjadi.

Selama ini gangguan yang terjadi khususnya pada ketertaman ketertiban umum hanya bersifat lokal, seperti; pencurian, demo-demo namun tidak anarkis, sedangkan gangguan bersifat SARA belum terjadi dan mudah-mudahan tidak terjadi.

2. Satuan Kerja dan Perangkat Daerah yang menangani ketentraman dan ketertiban umum.

Ada beberapa instansi yang menangani masalah ketentraman dan ketertiban.

a. Institusi diluar Pemerintah Kota, adalah :

- Kepolisian
- Kejaksaan
- TNI ABRI.

b. Institusi lingkup Pemerintah Kota, adalah:

- Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas;
- Kantor Pol PP
- PPNS (Bagian Hukum)
- Kantor Pemadam Kebakaran
- Dinas Kebersihan
- Dinas Pekerjaan Umum
- Dinas Kesehatan
- Dinas Nakertransos

**3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan.
Kota Kendari Tahun 2007**

No	SKPD	Tingkat Pendidikan					PANGKAT			
		SMP	SMA	D3	S1	S2	I	II	III	IV
1.	Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas	1	14	3	11	2		5	12	4
2.	Dinas Kebersihan	17	42	6	14	-	4	18	19	5
3.	Kantor Polisi Pamong Praja	4	93	3	8	-		12	4	1
4.	Kantor Pemadam Kebakaran	1	14	-	4	1	1	12	5	1
5.	Bagian Hukum	-	1	1	3	2		2	7	1
6.	Dinas PU	-	42	16	30	4		42	36	6
7.	Dinas Kesehatan	2	279	185	61	18		163	216	8
8.	Dinas Nakertransos	-	13	5	18	1		17	21	4
Jumlah		25	498	219	149	29				

Sumber Bappeda Kota Kendari, 2007

4. Sumber dan Jumlah Anggaran.

No	SKPD	Jumlah Anggaran Tahun 2007 (Rp)	Sumber Anggaran
1.	Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas	2.145.819.061	APBD Kota Kendari
2.	Dinas Kebersihan	4.429.731.956	APBD Kota Kendari
3.	Kantor Polisi Pamong Praja	1.820.292.778	APBD Kota Kendari
4.	Kantor Pemadam Kebakaran	2.121.151.995	APBD Kota Kendari
5.	Bagian Hukum	255.400.000	APBD Kota Kendari
6.	Dinas PU	28.756.035.723	APBD dan APBN
7.	Dinas Kesehatan		
	- APBD Kota	3.999.482.050	
	- DAK Kesehatan	6.895.000.000	
	- Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN)	1.397.211.000	
	- Perbaikan Gizi	517.675.500	
- Intervensi KIA	15.000.000		
8.	Dinas Nakertransos	3.241.031.451	APBD Kota Kendari



5. Penanggulangan dan kendalanya.

Jika terjadi suatu kejadian diwilayah Kota Kendari, maka penanggulangannya telah diatur dalam PROTAP di masing-masing Institusi dan saling melakukan koordinasi untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman sesama aparat di lapangan.

6. Keikutsertaan aparat keamanan dalam penanggulangan.

Setiap kejadian perkara baik itu sifatnya lingkungan maupun lokal dalam penanggulangannya selalu diikutsertakan aparat keamanan khususnya Polri, utamanya untuk menjaga agar kejadian perkara tidak melebar dan membesar dan selalu mencari pemecahan masalahnya dengan melakukan dialog dan melibatkan pihak-pihak yang merasa terlibat dalam suatu kejadian perkara.